



Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Gaza tahun 2024: Analisis Strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI

Annisa Dipa Pertiwi¹, Syaiful Anwar², Rizerius Eko Hadisancoko³

^{1,2,3} Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 21, 2025

Revised June 28, 2025

Accepted June 29, 2025

Available online June 29, 2025

Kata Kunci :

Diplomasi Pertahanan, OMSP, Bantuan Kemanusiaan, Soft Power, Gaza

Keywords:

Defense Diplomacy, MOOTW, Humanitarian Assistance, Soft Power, Gaza



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Annisa Dipa Pertiwi, Syaiful Anwar, Rizerius Eko Hadisancoko.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza tahun 2024 telah mengundang respons internasional, termasuk dari Indonesia sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap perjuangan Palestina. Dalam konteks ini, pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya merupakan manifestasi solidaritas, tetapi juga bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tahun 2024 menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia melalui penerapan strategi OMSP. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur akademik, penelitian ini menemukan bahwa operasi kemanusiaan TNI memperkuat citra soft power Indonesia di ranah internasional, meningkatkan kredibilitas Indonesia di forum multilateral, serta mendukung politik luar negeri bebas-aktif. Meskipun terdapat tantangan logistik dan diplomatik, pengiriman bantuan ini berhasil memperlihatkan diplomasi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika global. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka kebijakan OMSP untuk operasi kemanusiaan lintas negara guna mendukung efektivitas diplomasi pertahanan di masa mendatang.

ABSTRACT

The ongoing humanitarian crisis in Gaza in 2024 has drawn international responses, including from Indonesia, a country with a strong commitment to the Palestinian cause. In this context, the deployment of humanitarian aid by the Indonesian National Armed Forces (TNI) is not only an expression of solidarity but also part of the implementation of Military Operations Other Than War (OMSP), as mandated by the Law No. 34 of 2004 on the TNI. This article aims to analyze how the 2024 humanitarian mission to Gaza functions as an instrument of Indonesia's defense diplomacy through the application of OMSP strategies. Using a qualitative-descriptive approach based on document analysis and academic literature, this study finds that TNI's humanitarian operation enhances Indonesia's soft power image on the international stage, strengthens its credibility in multilateral forums, and supports its free and active foreign policy. Despite logistical and diplomatic challenges, the mission demonstrates Indonesia's adaptive defense diplomacy in response to global dynamics. The articles recommends strengthening the policy framework for cross-border OMSP humanitarian operations to enhance the effectiveness of defense diplomacy in the future.

1. PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang kembali memanas di Gaza pada tahun 2024 telah menjadi sorotan utama dunia internasional. Serangan udara, blokade, dan kerusakan infrastruktur vital telah menyebabkan bencana kemanusiaan besar, dengan ribuan korban jiwa dan pengungsi. Dalam situasi ini, Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, kembali menunjukkan komitmennya melalui pengiriman bantuan kemanusiaan. Pada

*Corresponding author

E-mail addresses: annisadipapertiwi@gmail.com (Annisa Dipa Pertiwi)

bulan April 2024, TNI mengirimkan bantuan logistik menggunakan pesawat C-130 Hercules menuju Yordania sebelum disalurkan ke wilayah Gaza, sebagai bentuk nyata dari diplomasi kemanusiaan Indonesia yang berkelanjutan ([Kemhan, 2024](#)). Langkah ini tidak hanya merefleksikan solidaritas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks global yang penuh ketidakpastian.

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen strategis politik luar negeri yang bertujuan membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan meningkatkan kerja sama militer non-kombatan secara bilateral maupun multilateral ([Fawaati, 2017](#)). Salah satu bentuk konkret dari diplomasi pertahanan Indonesia adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. OMSP memberikan dasar hukum bagi TNI untuk terlibat dalam tugas-tugas non-kombatan seperti bantuan kemanusiaan, tanggap darurat bencana, dan misi perdamaian internasional ([Darwanto, 2015](#)).

Dalam pelaksanaannya, pengiriman bantuan ke Gaza oleh TNI pada tahun 2024 menjadi representasi nyata dari implementasi OMSP. Ini memperlihatkan bagaimana kekuatan militer Indonesia digunakan secara strategis untuk memperkuat posisi diplomatik, membangun citra internasional yang positif, serta memperluas pengaruh melalui pendekatan *soft power* ([Setyawan, 2017](#)). *Soft power* yang dimanfaatkan dalam konteks ini mencakup nilai-nilai solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian, yang menjadi elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia.

Namun, pengiriman bantuan lintas negara tidak lepas dari tantangan signifikan. Hambatan logistik, kompleksitas koordinasi antar-lembaga nasional dan internasional, hingga dinamika geopolitik kawasan konflik menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ([Wulansari, 2017](#)). Selain itu, perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang sangat dinamis memerlukan kepekaan diplomatik yang tinggi agar misi kemanusiaan tidak disalahartikan sebagai intervensi politik atau militer ([Syarifudin et al., 2021](#)).

Pengalaman sebelumnya dalam misi-misi kemanusiaan dan perdamaian, seperti keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL di Lebanon, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam OMSP memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai promotor perdamaian global ([Widiatmaja, 2018](#)). Dengan demikian, misi kemanusiaan ke Gaza juga menjadi bagian dari diplomasi pertahanan jangka panjang Indonesia dalam membangun *trust* di forum internasional, seperti ASEAN *Defense Ministers' Meeting-Plus* (ADMM-Plus) dan forum PBB ([Mujianto et al., 2022](#)).

Mengingat kompleksitas tersebut, penelitian tentang implementasi OMSP dalam konteks pengiriman bantuan ke Gaza tahun 2024 menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi OMSP dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas OMSP di masa mendatang.

Artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur tentang diplomasi pertahanan serta memperkaya pemahaman tentang praktik nyata penggunaan kekuatan militer untuk tujuan kemanusiaan di tingkat global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena diplomasi pertahanan Indonesia secara mendalam melalui analisis terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tahun 2024. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dibalik tindakan negara dan aktor militer dalam kerangka hubungan internasional dan kebijakan pertahanan non-tradisional. Dalam penelitian mengenai diplomasi pertahanan, pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan metode yang relevan dan sering digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena hubungan

internasional secara kontekstual. Penelitian seperti yang dilakukan oleh [Dewti et al., \(2024\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif untuk memahami dinamika strategis diplomasi pertahanan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi kompetisi kekuatan besar. Dalam penelitiannya tentang diplomasi pertahanan Filipina, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri kapasitas pertahanan dan kerja sama strategis secara lebih mendalam melalui analisis dokumen dan kebijakan luar negeri.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi narasi-narasi kebijakan dan tindakan diplomatik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi berdampak besar dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Penelitian ini berfokus pada suatu kasus spesifik, yakni pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tahun 2024, sehingga tidak membahas operasi OMSP lainnya di wilayah berbeda atau tahun yang lain. Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk mengkaji aspek operasional teknis militer, melainkan pada dimensi strategis dan diplomatik dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam analisis implementasi OMSP oleh Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza tahun 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengiriman Bantuan Kemanusiaan sebagai Implementasi OMSP TNI

Pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza pada tahun 2024 merupakan implementasi nyata dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa TNI dapat “melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan”. Operasi ini memperlihatkan bahwa OMSP tidak hanya relevan dalam konteks domestic, tetapi juga dapat diperluas secara efektif dalam ranah internasional sebagai instrumen diplomasi pertahanan

Dalam pelaksanaannya, TNI mengerahkan satuan dari tiga matra – Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) – dengan menggunakan armada logistik dan pesawat angkut C-130 Hercules untuk mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, bahan makanan, alat medis, serta perlengkapan darurat lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi erat bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ([CNN Indonesia, 2024](#));([Medistiara, 2024](#));([Baznas, 2024](#)).

Penggunaan instrument militer dalam misi non-kombatan ini menunjukkan adanya evolusi paradigma pertahanan Indonesia. Jika sebelumnya militer diposisikan dalam kerangka pertahanan negara semata, kini peran tersebut diperluas untuk merespons tantangan kemanusiaan global, termasuk konflik bersenjata dan bencana kemanusiaan yang membutuhkan kapasitas logistik besar dan koordinasi cepat lintas negara ([Dewi et al., 2024](#)).

TNI sebagai salah satu alat negara dituntut untuk mampu bersinergi dengan elemen-elemen diplomasi dan kemanusiaan. Operasi pengiriman bantuan ke Gaza menjadi bukti konkret dari sinergi antara *hard power* (militer) dan *soft power* (nilai-nilai kemanusiaan) Indonesia dalam praktik diplomasi pertahanan ([Anwar, 2014](#)). Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam hubungan internasional yang menekankan kerja sama sipil-militer dalam penanggulangan krisis.

Dari segi taktis, interoperabilitas antar-matra TNI menjadi aspek penting dalam misi ini. Keberhasilan misi tidak hanya diukur dari keberangkatan logistik, tetapi juga dari kemampuan koordinasi lintas sektor dan efisiensi respins terhadap perubahan situasi di lapangan. Kesiapan ini merupakan refleksi dari pembinaan kekuatan TNI yang tidak hanya bertumpu pada kapasitas tempur, tetapi juga pada kemampuan tanggap darurat dan manajemen logistik strategis ([Setyawan, 2017](#)).

Dalam ranah diplomasi pertahanan, pengiriman bantuan ke Gaza juga memperkuat citra internasional Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian dunia. Sejak era reformasi, Indonesia berkomitmen pada kebijakan luar negeri bebas aktif yang tidak memihak, namun konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Melalui OMSP, Indonesia mewujudkan komitmen tersebut dalam bentuk aksi nyata yang mendapat pengakuan komunitas internasional ([Widiatmaja, 2018](#)).

Diplomasi pertahanan di sini tidak dilakukan melalui perjanjian militer atau aliansi keamanan, tetapi melalui respons moral dan logistik terhadap krisis kemanusiaan. Dalam perspektif ini, OMSP menjadi perpanjangan tangan dari strategi soft power Indonesia di tengah ketegangan global yang kian meningkat ([Fawaati, 2017](#)). Pendekatan ini juga menghindarkan Indonesia dari jebakan konflik ideologis atau geopolitik yang lebih luas.

Di sisi lain, pengiriman bantuan kemanusiaan juga mengandung dimensi simbolik yang kuat. Tindakan ini mencerminkan nilai solidaritas Asia-Afrika yang menjadi warisan historis Indonesia sejak Konferensi Bandung 1955. Dalam konteks ini, OMSP bukan hanya alat pertahanan nasional, tetapi juga instrumen kultural dan historis yang memelihara narasi politik luar negeri Indonesia sebagai pemimpin moral *Global South* ([Syarifudin et al., 2021](#)).

Operasi ke Gaza turut memperkuat kapasitas TNI dalam misi-misi internasional yang bersifat non-agresif. Ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi skenario masa depan seperti krisis iklim, pandemi global, dan instabilitas regional yang membutuhkan peran militer dalam konteks non-tradisional. Dengan demikian, OMSP juga berfungsi sebagai sarana adaptasi militer terhadap kompleksitas tantangan keamanan abad ke-21 ([Wulansari, 2017](#)). Dalam konteks manajemen strategis, kegiatan ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti NGO dan organisasi keagamaan dalam mendukung operasi militer non-tempur. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan bukan hanya efisien secara logistik, tetapi juga sensitif secara budaya dan politik ([Mujiyanto et al., 2022](#)).

Selain itu, OMSP TNI ke Gaza dapat dibaca sebagai bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam perwujudan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Aksi kemanusiaan lintas negara seperti ini menunjukkan bahwa militer dapat menjadi mitra pembangunan, bukan hanya penjaga teritorial ([Anwar, 2014](#)).

Penting juga dicatat bahwa keterlibatan militer dalam misi kemanusiaan tetap memerlukan batasan dan pengawasan yang ketat. Dalam literatur hubungan sipil-militer, kejelasan mandat, akuntabilitas, dan transparansi dalam operasi non-perang sangat diperlukan agar tidak terjadi perluasan fungsi militer yang berlebihan ([Dewi et al., 2024](#)). Keberhasilan misi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penguatan kerangka hukum OMSP. Revisi atau pembaruan terhadap peraturan pelaksana OMSP perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan tuntutan operasi internasional yang semakin kompleks. Ini penting agar OMSP tetap relevan, sah secara hukum, dan efektif di lapangan ([Darwanto, 2015](#)).

Pengiriman bantuan ke Gaza melalui OMSP memberikan pelajaran strategis bahwa militer bukan hanya alat kekerasan negara, tetapi juga aktor penting dalam diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui pendekatan seperti ini, Indonesia mampu mempertahankan posisi sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang tidak hanya vokal, tetapi juga operasional dalam perdamaian global.

Sebagai simpulan awal, implementasi OMSP dalam pengiriman bantuan ke Gaza menunjukkan keberhasilan pendekatan diplomasi pertahanan Indonesia yang menggabungkan kemampuan militer, komitmen politik luar negeri, dan dukungan moral kemanusiaan. Ke depan, misi serupa dapat dijadikan model diplomasi pertahanan yang lebih inklusif, adaptif, dan progresif.

OMSP dalam Fungsi Diplomasi Pertahanan dan Proyeksi Soft Power Indonesia

Sebagai bentuk diplomasi pertahanan, pengiriman bantuan ke Gaza membawa misi ganda, yaitu solidaritas kemanusiaan dan proyeksi kepentingan nasional. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan pendukung utama kemerdekaan Palestina, menggunakan OMSP sebagai sarana membangun reputasi internasional yang positif. Ini sejalan dengan pendekatan *soft power* sebagaimana dikembangkan oleh Joseph Nye (2004), di mana kekuatan negara tidak hanya terletak pada kemampuan militernya, tetapi juga dalam kemampuan memengaruhi pihak lain melalui nilai-nilai, budaya, dan kebijakan moral.

Diplomasi pertahanan yang diwujudkan melalui OMSP memungkinkan Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan militernya tidak selalu diasosiasikan dengan agresi atau konflik, tetapi juga dengan kontribusi terhadap perdamaian dan bantuan kemanusiaan global. Dalam konteks ini, OMSP menjadi wujud aktualisasi dari *soft power* Indonesia yang menonjolkan sisi etis dan empatik dari penggunaan kekuatan negara (Widiatmaja, 2018).

Operasi bantuan ke Gaza tahun 2024 tidak hanya relevan secara politik luar negeri, tetapi juga penting dalam membangun citra internasional Indonesia sebagai kekuatan moral. Keikutsertaan TNI dalam misi ini membawa pesan kuat bahwa Indonesia memihak pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak atas kemerdekaan, yang sangat resonan dalam dinamika politik global saat ini. Pemanfaatan *soft power* sebagai penyeimbang atau *ballast* dari *hard power* menghasilkan pandangan yang lebih baik dari komunitas internasional terhadap Indonesia (Anwar, 2014).

Lebih lanjut, pengiriman bantuan kemanusiaan oleh TNI juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan menunjukkan kontribusi konkret terhadap isu Palestina, Indonesia memperkuat kepemimpinannya di antara negara-negara mayoritas Muslim dan memperluas pengaruhnya dalam diplomasi multilateral (Almubaroq, 2023).

Soft power Indonesia tidak dibangun melalui propaganda atau dominasi budaya, tetapi melalui tindakan nyata yang konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui OMSP, TNI menjalankan fungsi-fungsi strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor konstruktif dalam penyelesaian krisis global. Ini sekaligus membedakan pendekatan Indonesia dari negara-negara besar yang cenderung menggunakan *hard power* dalam menangani konflik (Widodo et al., 2018).

Menurut Legionosuko dan Waluyo (2020), diplomasi pertahanan berbais OMSP membuka ruang baru bagi militer Indonesia untuk terlibat aktif dalam arena internasional tanpa harus melanggar prinsip-prinsip non-intervensi. Pendekatan ini juga menghindari persepsi bahwa Indonesia mendukung salah satu pihak dalam konflik bersenjata, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap perdamaian. Strategi ini memperkuat pemahaman diplomasi pertahanan tidak hanya sebagai alat untuk membangun aliansi militer, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk persepsi dan legitimasi internasional melalui aksi konkret. Diplomasi ini lebih bersifat *act-based diplomacy* daripada *talk-based diplomacy*, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia (Kusuma et al., 2021).

Dalam rangka kebijakan luar negeri, OMSP juga menjadi instrumen fleksibel yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk merespons berbagai dinamika krisis global dengan cepat dan tepat. Misalnya, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum negosiasi terkait resolusi konflik Timur Tengah atau dalam sidang Dewan HAM PBB (Widjayanto et al., 2021).

Proyeksi *soft power* melalui OMSP juga memiliki nilai strategis jangka panjang. Dengan memperlihatkan bahwa TNI mampu menjalankan misi luar negara dengan profesionalisme

tinggi dan sensitivitas politik yang baik, Indonesia membangun reputasi sebagai negara yang dapat diandalkan dalam kerja sama global di bidang kemanusiaan dan keamanan non-tradisional ([Nugroho, 2024](#)).

Akhirnya, keberhasilan OMSP dalam pengiriman bantuan ke Gaza menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi bisa diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan luar negeri praktis. Indonesia mampu menjembatani peran militer dan kepentingan diplomatiknya dalam satu paket kebijakan yang humanis, etis, dan strategis.

Tantangan Diplomati dan Strategi Adaptif OMSP

Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza bukan tanpa hambatan. Tantangan utama meliputi hambatan logistik, termasuk akses ke wilayah konflik yang diblokade; perizinan diplomatik dengan negara transit seperti Mesir dan Israel; serta ancaman keamanan terhadap personel militer dan distribusi bantuan selama di wilayah konflik. Kompleksitas tantangan ini menunjukkan bahwa OMSP bukan hanya sekadar pengerahan kekuatan militer, tetapi juga mencakup dimensi diplomasi yang strategis dan adaptif terhadap situasi geopolitik.

Hambatan logistik menjadi tantangan mendasar dalam pengiriman bantuan lintas batas. Blokade yang diberlakukan di wilayah Gaza membatasi jalur masuk bantuan dan memerlukan koordinasi intensif dengan negara-negara sekitar. Seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia ([CNN Indonesia, 2024](#)), pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza mengalami kendala akibat blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel, serta proses koordinasi yang kompleks dengan otoritas Mesir. Blokade tersebut membatasi jalur masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza, terutama melalui pintu Rafah – satu-satunya akses lintas perbatasan yang relatif buka. Proses negosiasi untuk membuka akses tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat dan sangat bergantung pada situasi politik serta keamanan yang terus berubah di kawasan tersebut. TNI harus mampu menavigasi rute udara dan darat yang aman, termasuk pengaturan penerbangan, izin pendaratan, serta pengawasan distribusi bantuan di lapangan ([Prasetyo et al., 2019](#)). Dalam konteks ini, OMSP menuntut fleksibilitas operasional serta kapasitas logistik yang mumpuni untuk menjangkau area terdampak secara efektif.

Selain logistik, diplomasi lintas negara juga menjadi signifikan. Meskipun Indonesia memiliki posisi diplomatik yang konsisten dalam mendukung Palestina, izin transit dan kolaborasi dengan negara seperti Mesir tetap menjadi syarat penting. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Tetap di PBB berperan penting dalam membuka jalur negosiasi diplomatik agar misi TNI tidak dianggap sebagai bentuk intervensi militer, melainkan murni aksi kemanusiaan ([Lubis, 2022](#)).

Ancaman keamanan juga perlu mendapat perhatian serius. Meskipun misi ini bersifat non-kombatan, situasi di wilayah konflik yang dinamis dan rawan serangan membuat personel TNI yang bertugas berada dalam ancaman. Oleh karena itu, strategi pengamanan harus dirancang dengan secara matang, termasuk kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNRWA atau ICRC yang telah beroperasi di zona konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sambil memastikan efektivitas distribusi bantuan ([Agustina, 2022](#)).

Keterlibatan berbagai aktor non-negara dalam distribusi bantuan juga menimbulkan tantangan koordinasi. Perbedaan standar operasional antar-lembaga, baik dari dalam negeri seperti Baznas dan PMI maupun dari luar negeri, bisa menghambat efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan OMSP. Dalam hal ini, pembentukan satuan tugas lintas sektoral menjadi kunci untuk menyelaraskan agenda, logistik, dan komunikasi lapangan ([Lubis, 2022](#)).

Tantangan hukum dan yurisdiksi menjadi dimensi yang tidak kalah penting. Dalam pelaksanaan OMSP lintas batas, TNI berhadapan dengan hukum internasional, hukum perang, serta hak-hak kemanusiaan yang harus dijaga. Pelanggaran sekecil apa pun dapat berdampak negatif pada kredibilitas internasional Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas personel TNI dalam memahami kerangka hukum internasional sangat diperlukan ([Chadhafi, 2021](#)).

Menanggapi tantangan-tantangan tersebut, TNI mengembangkan strategi adaptif dalam OMSP. Pendekatan ini mencakup pelatihan intensif terhadap pasukan yang akan ditugaskan dalam operasi kemanusiaan internasional, kerja sama diplomatik regional yang lebih aktif, serta pemanfaatan platform multilateral seperti ADMM-Plus untuk menggalang dukungan politik dan logistik dari negara sahabat ([Santoso, 2022](#)).

Strategi adaptif juga terlihat dalam pemilihan alat utama sistem senjata (alutsista) yang digunakan. Dalam pengiriman bantuan ke Gaza, TNI menggunakan pesawat C-130 Hercules yang memiliki daya angkut besar serta kemampuan mendarat berbagai medan. Pemilihan alutsista ini menunjukkan kemampuan TNI dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan operasi di lapangan ([Arbani, 2024](#)).

Lebih dari itu, pengalaman OMSP di Gaza harus dijadikan bahan evaluasi jangka panjang dalam penyusunan doktrin dan kebijakan pertahanan Indonesia. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan operasional, tetapi juga pada mekanisme kerja sama diplomatik, pengelolaan ancaman, dan pencapaian tujuan soft power. Dengan demikian, OMSP dapat terus dikembangkan sebagai instrumen pertahanan adaptif di masa depan ([Widiatmaja, 2018](#)).

Keseluruhan tantangan ini menegaskan bahwa OMSP bukan sekadar instrumen militer, tetapi juga merupakan instrumen diplomatik yang memerlukan sensitivitas tinggi terhadap dinamika global. Oleh karena itu, penguatan integrasi militer dan diplomasi sipil perlu ditingkatkan agar OMSP tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum, legitimasi dan moralitas internasional.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza tahun 2024 merupakan bentuk konkret implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berfungsi secara efektif sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Melalui penerahan kekuatan militer secara non-kombatan dalam misi kemanusiaan, Indonesia mampu menunjukkan kepemimpinan moral, memperkuat citra internasional, serta mengedepankan nilai-nilai solidaritas kemanusiaan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Penggunaan OMSP dalam konteks ini terbukti efektif dalam memperluas cakupan soft power Indonesia, menegaskan bahwa militer dapat menjadi aktor strategis dalam memperkuat posisi diplomatik negara di kawasan dan dunia internasional. Pengalaman pengiriman bantuan ke Gaza juga memperlihatkan bahwa OMSP bukan hanya respons taktis terhadap bencana atau konflik, melainkan bagian dari desain strategis dalam pertahanan non-tradisional Indonesia.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, disampaikan dua rekomendasi strategis: Penguatan Mekanisme Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Agar OMSP dapat dijalankan secara efisien dan diplomatik, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan terstruktur antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Lembaga-lembaga kemanusiaan nasional. Hal ini dapat difasilitasi dalam bentuk satuan tugas lintas sektor dengan protokol standar dalam merespons krisis internasional.

Penyusunan Dokumen Strategi OMSP untuk Operasi Kemanusiaan Lintas Negara Indonesia perlu memiliki dokumen strategis yang merinci skema, prinsip, prosedur, dan Batasan keterlibatan militer dalam misi kemanusiaan luar negeri. Dokumen ini dapat berbentuk white paper atau strategi nasional OMSP lintas negara, yang tidak hanya memperkuat legitimasi diplomatik, tetapi juga menjadi acuan kebijakan dalam forum regional seperti ASEAN dan internasional seperti PBB.

5. REFERENSI

Agustina, B. N. A. (2022). Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Universitas Mataram, 1–25.

- Almubaroq, H. Z. (2023). *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*. Indonesia Emas Group.
- Anwar, S. (2014). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan Agustus*, 4((2)), 71–94.
- Arbani, A. (2024). Pentingnya Badan Intelijen Pertahanan dalam Non-Combat Military Mission: Instrumen Perhatian Khusus untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pertahanan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1876–1891. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1201>
- Baznas. (2024). *BAZNAS kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebanyak 14 Truk kontainer*. Baznas.
- Chadhafi, M. I. (2021). *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara*. Jejak Pustaka.
- CNN Indonesia. (2024). *TNI Ungkap Alasan Bantuan RI untuk Gaza Disalurkan Yordania via Udara*. CNN Indonesia.
- Darwanto, H. (2015). *Operasi Militer Selain Perang*. Kementerian Pertahanan RI.
- Dewi, D. A. C., Pedraso, R., & Perwita, A. A. B. (2024). Diplomasi Pertahanan Filipina Untuk Capacity Building di Tengah Persaingan AS-Tiongkok. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(No 3), 921–930.
- Fawaati, S. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan United States Defense Institutional Reform Initiatives. *Diplomasi Pertahanan*, 3(1).
- Kemhan. (2024). *Indonesia Berhasil Kirim Bantuan ke Gaza via Pesawat Hercules C130 TNI AU, Kolaborasi dengan Yordania*. Kemhan.go.id.
- Kusuma, W. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). The Relevance of Marine Defense Strategy Based on Jalesveva Jayamahe Doctrine on Globalization and Strategic Environment Development. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), 77–100.
- Lubis, A. F. (2022). *Strategi dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum Bagi TNI AD Pada OMSP* (T. Q. Media (ed.); CCet. 1). CV. Penerbit Qiara Media.
- Medistiara, Y. (2024). *PMI Distribusi 32 , 5 Ton Bantuan dari Masyarakat RI untuk Pengungsi Gaza*. detikNews.
- Mujianto, M., Hidayat, T. R., & Akim, A. (2022). Kontribusi Intelijen TNI AU Dalam Kegiatan Kontra Terorisme Melalui Program Asean Our Eyes (Aoe) Guna Mendukung Keamanan Negara. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38864>
- Nugroho, P. A. (2024). *Optimalisasi pertahanan negara dalam mengantisipasi eskalasi konflik di laut china selatan guna menjaga kepentingan nasional*. Lemhannas RI.
- Nye, J. (2004). *Soft Power : The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim (Marine Defense Strategy the Government of Indonesia in Keeping Maritime Security). *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 31–50.
- Primayanti, L. P. I., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2020). Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 89–116.
- Santoso, T. I. (2022). Aksi Agresivitas Cina Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 34–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i1.302>
- Setyawan, R. W. P. (2017). Pemberdayaan Operasi Pemeliharaan Perdamaian untuk Mempromosikan Produk Dalam Negeri (Suatu Studi di Lebanon dan Kongo). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(3), 1–16.
- Syarifudin, K. F., A.R, D. D., Nurcahyani, E., & Prakoso, L. Y. (2021). Indonesia Poros

- Maritim Dunia: Mengembangkan Keamanan Nasional Melalui Perspektif Kerjasama Pertahanan Di Kawasan. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 7(1), 16–26.
- Widiatmaja, A. (2018). *Analisis Strategi dan Diplomasi Pertahanan Indonesia Pada Kerjasama Multilateral di ASEAN Defense Ministers' Meeting-Plus Expert Working Group on Counter-Terrorism (ADMM-PLUS EWG-CT)*. Republic of Indonesia Defense University.
- Widjayanto, J., Dadang, D., Priyanto, Prakoso, L. Y., Risman, H., & Setiadi, M. I. (2021). KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA DI ABAD 21. *Media Bina Ilmiah*, 16(1), 6115–6120. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33758/mbi.v16i1.1274>
- Widodo, P., Siswoyo, M., & Timur, F. G. C. (2018). Strategi Penjagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina Dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Agustus 4(Nomor 2), 21–48.
- Wulansari, E. M. (2017). *Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme*. 2((1)), 219–248.